

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa perubahan, yaitu pada sitem pemungutan pajak, jenis pajak daerah, obyek pajak daerah dan tarif pajak daerah .
2. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana Untuk sebelum pemberlakuan UU No.28 Tahun 2009 diambil 3 tahun yaitu dari tahun 2007-2009 dan untuk sesudah pemberlakuan UU. No.28 tahun 2009 diambil 3 tahun terakhir juga, yaitu dari tahun 2015-2017. Secara keseluruhan selama tahun 2007-2009 penerimaan pajaknya sudah sangat efektif. Peresentase efektivitas Pajak Daerah secara keseluruhan untuk tahun 2007 sebesar 100,16%, tahun 2008 sebesar 121,04% dan tahun 2009 sebesar 120,26%, Begitu juga dengan Penerimaan Pajak Daerah provinsi untuk Tahun 2015-2017 secara keseluruhan juga sudah sangat efektif . Peresentase efektivitas Pajak Daerah secara keseluruhan untuk tahun 2015 sebesar 100,59%, tahun 2016 sebesar 102,14% dan tahun 2017 sebesar 101,41%

3. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah provinsi dapat dilihat bahwa tahun 2007-2009 memiliki perosentase efektivitas yang lebih baik dari pada tahun 2015-2017, padahal secara pelaksanaannya ada beberapa penambahan pada jenis dan obyek pajak daerah provinsi serta beberapa kenaikan pada tarif pajak daerah provinsi harusnya lebih memacu peningkatan pada tingkat efektivitas pajak daerah provonsi. Terlihat bahwa adanya penurunan tingkat efektivitas dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah provinsi.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dari hasil pembahasan pada penulisan ini antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan dan dinas yang berwenang harus lebih meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam menjalani fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik lagi
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih mengoptimalkan pelayanan jasa umum kepada masyarakat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan alternatif kemudahan bagi setiap wajib pajak baik dalam membayar Pajak Daerah maupun dengan memberikan info-info serta pertauran-peraturan yang harus dipatuhi oleh para wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Eko. 2017. *Analisis Efektivitas dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)* [skripsi]. Bandarlampung : Universitas Lampung
- Harumdhani, Normalisa. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta*
- Halim, Abdul. 2004 *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Jamaludin, Malik. 2010. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Periode tahun 2006-2010 Pada Kota Tangerang Selatan.* [skripsi]. Jakarta : Universitas Islam Syarif Hidayatullah
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan* Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Offesr
- Mudrajad, Kuncoro. (2004). *Otonomi dan pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Erlangga*
- Octaviana S, Devy. 2012. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah* [skripsi]. Jawa Tengah : Universitas Dian Nuswantoro Semarang Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 200 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) [skripsi]. Surakarta : Unversitas Sebelas Maret
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak.* Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah